

**TAHUN
2023**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan

pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Sumenep, Februari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

WAHYU KURNIAWAN PRIBADI, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	42
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas:

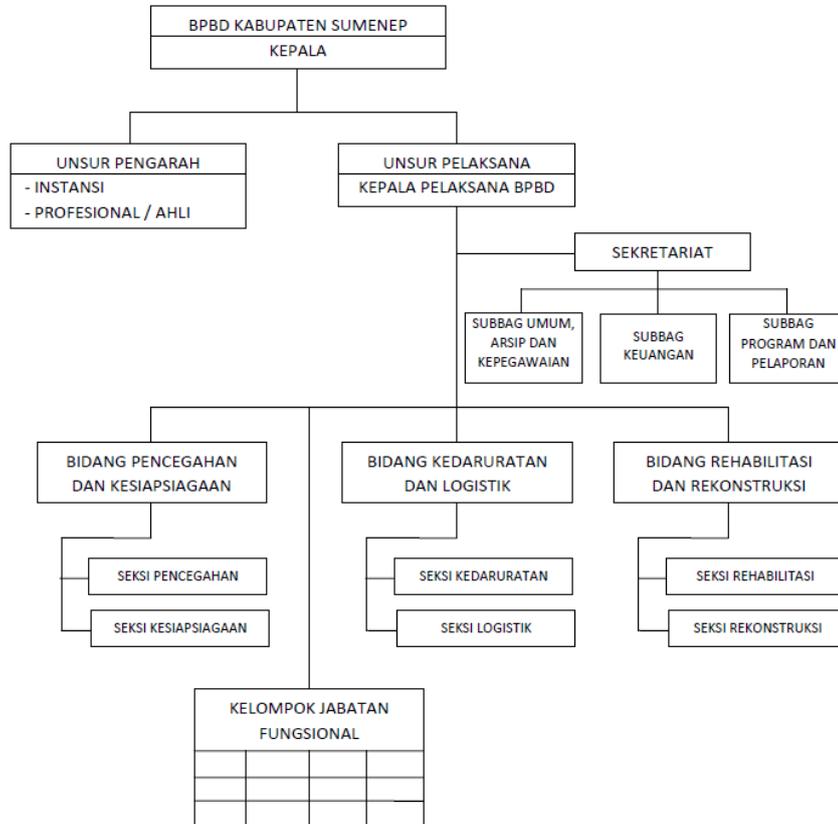
- a. pelaksanaan, pengoordinasian, pengakomodasian dan pelaksanaan terhadap tugas fungsi Badan; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Pelaksana sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi / Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumenep



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yang kurang memadai;
3. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
4. Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim;
5. Ketidakberpihakan pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dalam penanganan kebencanaan yang ada di daerah.

Perumusan isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terbatasnya tenaga relawan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang terbatas;
3. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional masih kurang memadai;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 4 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana			Indeks Kapasitas Daerah	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
		1.1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah	4.84	4.90	5.25	5.60	5.95

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	Pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan dasar urusan bencana	Kebutuhan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan dasar urusan bencana yang dilaksanakan dibagi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan dasar urusan bencana yang direncanakan dikalikan seratus persen	BPBD Kabupaten Sumenep
1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	1.1	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang	Kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dibagi kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan dibagi seratus persen	
2.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana	2.	Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten		Pemenuhan pelayanan dasar urusan bencana	Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten	BPBD Provinsi
2.1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana di Kabupaten	2.1	Indeks Resiko Bencana Kabupaten			Indeks Resiko Bencana Kabupaten	BNPB

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 :

Tabel 2.4

Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana			Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten	-	0.70
		1.1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	-	180

Sumber : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi tujuan dan sasaran. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	- Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten	-	0.70	0.70

2	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja BPBD	-	Nilai SAKIP BPBD	-	A	-
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	-	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	4.583.235.605	4.658.295.704
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	21 dokumen	21 dokumen	5.372.816	5.372.816

1.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	513.930	513.930
1.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3.351.395	3.351.395
1.1.3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 dokumen	14 dokumen	1.507.491	1.507.491
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	3.229.855.584	3.216.938.171
1.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang	28 orang	3.223.144.258	3.210.226.845
1.2.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	144 laporan	144 laporan	6.711.326	6.711.326
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1 jenis	1 jenis	0	87.981.952

1.3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributa	28 paket	74 set	0	87.981.952
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	6 jenis	6 jenis	988.286.117	988.286.117
1.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	84 paket	84 paket	8.147.628	8.147.628
1.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	132 paket	132 paket	636.927.021	636.927.021
1.4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	108 paket	108 paket	137.649.448	137.649.448
1.4.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	84 paket	84 paket	23.754.000	23.754.000
1.4.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen	36 dokumen	59.368.020	59.368.020
1.4.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	160 laporan	160 laporan	122.440.000	122.440.000
1.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 unit	4 unit	11.393.484	11.393.484

1.5.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	1 unit	3.104.892	3.104.892
1.5.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	8.288.592	8.288.592
1.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	2 jenis	2 jenis	92.244.807	92.244.807
1.6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	1.802.307	1.802.307
1.6.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	48 laporan	90.442.500	90.442.500
1.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	32 unit	32 unit	256.082.797	256.078.357
1.7.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	20 unit	205.026.435	205.026.435
1.7.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	9 unit	24.946.140	24.941.700
1.7.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	3 unit	26.110.222	26.110.222

2.	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	180	146,4	404.944.836	804.941.865
2.1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	7.612.136	7.612.136
2.1.1.	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	200 orang	200 orang	7.612.136	7.612.136
2.2.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan	3 jenis	3 jenis	368.717.411	793.295.388
2.2.1.	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	270 orang	300 orang	251.638.790	676.217.022

2.2.2.	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten / kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	15 dokumen	15 dokumen	44.813.891	44.813.636
2.2.3.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	88 orang	88 orang	72.264.730	72.264.730
2.3.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	28.615.289	4.034.341
2.3.1.	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	1 dokumen	4.034.341	4.034.341
2.3.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 orang	-	24.580.948	0

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

tujuan / sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan / sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan / sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan / sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	100%	111%	Sangat Tinggi	BPBD Kabupaten Sumenep

1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	90%	97,57%	108,41%	Sangat Tinggi	BPBD Kabupaten Sumenep
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten	0,70	0,63	90%	Tinggi	BPBD Provinsi Jawa Timur
2.1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana di Kabupaten	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	180	146,4	122,95%	Sangat Tinggi	BNPB

Uraian penjelasan tabel :

- Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mengalami capaian kinerja sebesar 111% karena seluruh kegiatan penunjang serta pelayanan dasar urusan bencana yang direncanakan telah dilaksanakan.
- Sasaran program 1 yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dengan indikator kinerja Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor mengalami capaian kinerja sebesar 108,41% karena kebutuhan sarana dan prasarana kantor berhasil dipenuhi.
- Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten mengalami capaian kinerja sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena pada saat penilaian IKD, beberapa dokumen kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sumenep masih dalam tahap penyusunan (belum dilegalisasi).
- Sasaran program 2 yaitu Terlaksananya Penanggulangan Bencana di Kabupaten dengan indikator Indeks Resiko Bencana Kabupaten mengalami capaian kinerja sebesar 122,95%. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sumenep sebesar 146,4. Angka ini lebih kecil dari target yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Sumenep. Semakin kecil

Indeks Resiko Bencana yang didapatkan menandakan keberhasilan daerah dalam menanggulangi bencana.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	100%	111%	90%	100%	111%
1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	90%	90%	100%	90%	97,57%	108,41%
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten	0,65	0,61	93,84%	0,70	0,63	90%
2.1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana di Kabupaten	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	185	155,93	118,64%	180	146,4	122,95%

Uraian penjelasan tabel :

- Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.
- Sasaran program 1 yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dengan indikator kinerja Persentase Terpenuhinya

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor mengalami kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya ada sub kegiatan yang tidak terlaksana.

- Indeks Kapasitas Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaian kerjanya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ada beberapa dokumen kebencanaan yang masih dalam tahap penyusunan dan belum dilegalisasi pada tahun 2023.
- Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian kerjanya pun mengalami kenaikan. Hal ini menandakan keberhasilan BPBD Kabupaten Sumenep dalam upaya penurunan resiko bencana.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,63	0,85	74,11%
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah	4,41	5,95	74,11%
	Sasaran Program : Terlaksananya Penanggulangan Bencana di Kabupaten	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	146,4	165	112,70%

Uraian penjelasan tabel :

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah sudah terealisasi sebesar 0,63 pada tahun 2023. Tingkat kemajuan capaian ini sebesar 74,11% untuk mencapai target akhir sebesar 0,85 pada tahun 2026.

Indikator kinerja Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah sudah terealisasi sebesar 4.41 pada tahun 2023. Tingkat kemajuan capaian ini sebesar 74,11% untuk mencapai target akhir sebesar 5.95 pada tahun 2026.

Indikator kinerja Indeks Resiko Bencana Kabupaten sudah terealisasi sebesar 146,4 pada tahun 2023. Tingkat kemajuan capaian ini sebesar 112,70% untuk mencapai target akhir sebesar 165 pada tahun 2026.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi /
Kabupaten lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%		
1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	97,57%		
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten	0,63		
2.1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana di Kabupaten	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	146,4		

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PD	BB	A		Berhasil menaikkan peringkat SAKIP dari BB menjadi A	Memenuhi kebutuhan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP
	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	100%	111%	Capaian kinerja lebih tinggi dari target karena hampir semua kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan berhasil mencapai target indikator	
1.1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	90%	97,57%	108,41%	Capaian kinerja lebih tinggi dari target karena hampir semua kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan berhasil mencapai target indikator	

1.1.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	21 dokumen	21 dokumen	100%		
1.1.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%		
1.1.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	100%		
1.1.1.3	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 laporan	14 laporan	100%		
1.1.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	100%		
1.1.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang	28 orang	100%		

1.1.2.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rea lisasi Kinerja SKPD dan Lapo ran Hasil Koor dinasi Peny usunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144 laporan	144 laporan	100%		
1.1.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1 jenis	1 jenis	100%		
1.1.3.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	74 paket	74 paket	100%		
1.1.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	6 jenis	6 jenis	100%		
1.1.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	84 paket	84 paket	100%		
1.1.4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peral tan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	132 paket	132 paket	100%		

1.1.4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	108 paket	108 paket	100%		
1.1.4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	84 paket	84 paket	100%		
1.1.4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen	36 dokumen	100%		
1.1.4.6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	160 laporan	86 laporan	53,75%		
1.1.5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 unit	4 unit	100%		
1.1.5.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	1 unit	100%		
1.1.5.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	100%		
1.1.6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%		

1.1.6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	100%		
1.1.6.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	48 laporan	100%		
1.1.7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	32 unit	32 unit	100%		
1.1.7.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	20 unit	100%		
1.1.7.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	9 unit	100%		
1.1.7.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	3 unit	100%		
2	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,70	0,63	90%	Indikator ini belum mencapai target karena ada dokumen kebencanaan	Percepatan penyusunan dokumen kebencanaan

						yang masih dalam tahap penyusunan dan belum dilegalisasi	
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah	4,90	4,41	90%		
2.1	Program : Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	180	146,4	122,95%	Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sumanep tahun 2023 berhasil melebihi target yang ditetapkan. Semakin kecil nilai IRB menandakan semakin kecil resiko bencana yang bisa terjadi	
2.1.1	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	100%		
2.1.1.1	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana) secara tatap	200 orang	180 orang	90%		

		muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya					
2.1.2	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100%		
2.1.2.1	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara dan aparat yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	270 orang	270 orang	100%		
2.1.2.2	Sub Kegiatan : Penanganan Pasacabencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten / kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	15 dokumen	15 dokumen	100%		
2.1.2.3	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	88 orang	88 orang	100%		

2.1.3	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	100%		
2.1.3.1	Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	1 dokumen	100%		

Uraian penjelasan tabel :

Capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota lebih tinggi dari target karena hampir semua kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan berhasil mencapai target indikator.

Indikator Tujuan 2 – Indeks Kapasitas Daerah belum mencapai target karena ada dokumen kebencanaan yang masih dalam tahap penyusunan dan belum dilegalisasi

Indikator Program Penanggulangan Bencana yaitu Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 berhasil melebihi target yang ditetapkan. Semakin kecil nilai IRB yang diperoleh menandakan semakin kecil resiko bencana yang bisa terjadi di daerah tersebut.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PD	A	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Persentase terpe nuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	108,41%	Menunjang
	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	111%	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Penyusunan Doku men Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rea lisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny usunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rea lisasi Kinerja SKPD	100%	
				Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	

				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reali sasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koor dinasi Peny sunan Laporan Ca paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	100%	
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Peral tan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	

				Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perun dang-undangan yang disediakan	100%	
				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	53,75%	
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	
				Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang

				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100%	
2	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	118,64%	Program : Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	122,95%	Menunjang
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah	90%	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang	90%	

					ada di kawasan tempat tinggalnya		
				Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100%	
				Sub Kegiatan : Penanganan Pasacabencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kab / kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	
				Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab / Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	100%	
				Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100%	

Uraian penjelasan tabel :

Keberhasilan pelaksanaan tujuan 1 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Keberhasilan pelaksanaan tujuan 2 yaitu Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana didukung oleh satu program yaitu Program Penanggulangan Bencana. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan tujuan ini di antaranya Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.658.295.704	4.112.292.475	88,27%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.372.816	4.740.500	88,23%

1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.216.938.171	2.718.002.768	84,49%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.981.952	87.661.270	99,63%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.286.117	962.976.478	97,43%
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.393.484	10.887.760	95,56%
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.244.807	78.954.816	85,59%
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.078.357	249.068.883	97,26%
2	Program Penanggulangan Bencana	804.941.865	791.344.789	98,31%
2.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	7.612.136	6.853.000	90,02%
2.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	793.295.388	780.475.539	98,38%
2.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.034.341	4.016.250	99,55%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	100%	111%	4.658.295.704	4.112.292.475	88,27%	1,25
1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	90%	97,57%	108,41%	4.658.295.704	4.112.292.475	88,27%	1,22
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana	0,70	0,63	90%	804.941.865	791.344.789	98,31%	0,91
2.1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana di Kabupaten	180	146,4	122,95%	804.941.865	791.344.789	98,31%	1,25

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan 2 yaitu Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Bencana dengan indikator tujuan Indeks Kapasitas Daerah memiliki tingkat efisiensi 0,91 sehingga termasuk tidak efisien. Hal ini disebabkan ada beberapa dokumen kebencanaan yang dibutuhkan saat penilaian

Indeks Kapasitas Daerah masih dalam tahap penyusunan dan belum dilegalisasi sehingga Indeks Kapasitas Daerah tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	90%	97,57%	108,41%	4.658.295.704	4.112.292.475	88,27%	1,22
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 doku men	21 dokumen	100%	5.372.816	4.740.500	88,23%	1,13
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 jenis	2 jenis	100%	3.216.938.171	2.718.002.768	84,49%	1,18
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 jenis	1 jenis	100%	87.981.952	87.661.270	99,63%	1,003
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 jenis	6 jenis	100%	988.286.117	962.976.478	97,43%	1,02
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit	4 unit	100%	11.393.484	10.887.760	95,56%	1,04
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2 jenis	100%	92.244.807	78.954.816	85,59%	1,16

1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 unit	32 unit	100%	256.078.357	249.068.883	97,26%	1,02
2	Program Penanggulangan Bencana	180	146,4	122,95%	804.941.865	791.344.789	98,31%	1,25
2.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	1 jenis	1 jenis	100%	7.612.136	6.853.000	90,02%	1,11
2.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3 jenis	3 jenis	100%	793.295.388	780.475.539	98,38%	1,01
2.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 jenis	1 jenis	100%	4.034.341	4.016.250	99,55%	1,004

Uraian penjelasan tabel :

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,22.

Pada Program Penanggulangan Bencana, efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,25.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,41% (kategori Sangat Tinggi)

- Tujuan 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 118,64% (kategori Sangat Tinggi)

- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90% (kategori Tinggi)
- Sasaran Program 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 122,95% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.463.237.569 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.903.637.264 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 89,75% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,21.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep, Februari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

WAHYU KURNIAWAN PRIBADI, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199311 1 001

